

RINGKASAN EKSEKUTIF

**LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK
“KERJA SAMA LUAR NEGERI INDONESIA
DALAM PENANGGULANGAN TERORISME”**

Ketua: Simela Victor Muhamad

**PUSAT PENELITIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
JAKARTA
2018**

Tidak dapat dipungkiri, bahwa aksi terorisme hingga kini masih menjadi keprihatinan internasional dan perlu untuk terus diwaspadai, karena bukan tidak mungkin aktivitas terorisme yang mewarnai belahan dunia di tahun 2017 dan di tahun-tahun sebelumnya, akan kembali terjadi jika tidak ada upaya bersama dari masyarakat internasional untuk menanggulangnya. Di sepanjang tahun 2017, setidaknya telah terjadi tujuh aksi terorisme “mematikan” di berbagai kawasan dunia yang mengakibatkan ratusan jiwa manusia menjadi korban. Meski tidak pernah memperlihatkan bukti, ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) mengklaim bertanggung jawab atas sebagian besar aksi teror tersebut, sehingga ada yang berpandangan bahwa kelompok radikal ini sebagai organisasi teroris.

Dikaitkannya ISIS dengan terorisme sepertinya sulit dihindari jika memerhatikan gerakan kelompok radikal ini di Irak dan Suriah yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian ISIS dikenal sebagai kelompok radikal yang paling disorot dan sering dikaitkan dengan aksi terorisme yang terjadi di berbagai kawasan dunia. Hal itu juga tidak lepas dari pengakuan mereka sendiri yang menyatakan terlibat. Keterlibatan dan pengaruh ISIS dengan berbagai aksi terorisme bisa menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan di suatu kawasan, dan hal itu sudah terlihat dalam konflik di Marawi, Filipina, pada tahun 2017 lalu.

Belajar dari konflik di Marawi, yang dilatarbelakangi oleh adanya keterkaitan dengan kelompok radikal ISIS (yang pengaruhnya begitu luas), dan berbagai aksi terorisme lainnya di berbagai kawasan dunia di mana para pelakunya merupakan aktor non-negara dan banyak diantaranya memiliki jejaring lintas batas, maka upaya untuk menanggulangi terorisme tidak cukup dilakukan hanya oleh satu negara. Pengaruh dan jejaring teroris di era modern saat ini, sebagaimana dikemukakan Sekjen PBB, Antonio Guterres, sudah sedemikian luas, melintasi banyak negara, dengan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perdamaian, keamanan, dan pembangunan internasional.

Adanya keterkaitan antara aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dengan kelompok teroris di luar negeri menunjukkan bahwa terorisme telah menjadi persoalan lintas negara, dan hal itu juga terlihat dalam beberapa aksi terorisme di negara lain, di mana kasusnya tidak berdiri sendiri tetapi juga ada kaitannya dengan jejaring teroris di luar negeri. Kasus Marawi di Filipina, sekali lagi, menjadi contoh adanya keterkaitan itu,

dan oleh karena itu Indonesia, yang sudah beberapa kali menghadapi aksi terorisme, perlu membangun kerja sama dengan negara-negara lain dalam menanggulangi terorisme yang bersifat lintas negara itu. Kerja sama tersebut sudah tentu tidak saja ditujukan untuk kepentingan keamanan Indonesia semata, tetapi juga untuk kepentingan stabilitas keamanan di kawasan.

Bagi Indonesia, yang berada di Asia Tenggara, kerja sama tersebut dilakukan antara lain melalui kerja sama secara bilateral atau trilateral dengan negara-negara sesama anggota ASEAN yang berbatasan, untuk menangani atau untuk mengantisipasi persoalan terorisme agar tidak berkembang di dalam negeri dan meluas di kawasan. Indonesia, sebagai negara tetangga dan berbatasan dengan Filipina, tidak bisa abai terhadap situasi yang terjadi di Marawi, di mana konflik bersenjata yang terjadi di sana ditengarai ada keterkaitannya dengan kelompok radikal ISIS. Menurut Kepala BNPT, setelah ISIS di Suriah hancur, banyak anggotanya yang menyeberang ke Indonesia. Ada juga simpatisan ISIS di Indonesia yang ingin berperang ke Marawi karena daerah konflik selalu menjadi “medan magnet” (tempat yang menarik) bagi mereka untuk berjihad.

Adanya sejumlah WNI yang diduga terlibat dalam konflik bersenjata di Marawi menimbulkan dugaan bahwa pasca-kekuatan ISIS di Suriah menurun, banyak orang Indonesia yang pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, dalam perjalanannya kembali ke Indonesia mereka singgah di Filipina, sehingga timbul anggapan bahwa ISIS mengirim mereka untuk bertempur di Marawi. Hal tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan di kalangan pejabat Filipina bahwa sejumlah warga Indonesia, dan juga Malaysia, yang diduga berafiliasi dengan ISIS membantu kelompok-kelompok pemberontak dalam pertempuran melawan pemerintah Filipina.

Dari kasus Marawi terlihat bahwa kerja sama bilateral antara Indonesia dan Filipina, bahkan secara trilateral dengan melibatkan Malaysia, menjadi suatu keharusan, terutama untuk mencegah agar persoalan yang terjadi di Marawi tidak meluas ke Indonesia dan Malaysia, dan juga kawasan, selain tentunya untuk membantu Filipina agar persoalan yang terjadi di Marawi dapat teratasi. Posisi ketiga negara yang saling berbatasan dengan wilayah perairannya yang terbuka dan berpulau-pulau, ditambah dengan jumlah dan kapasitas aparat keamanan yang terbatas, telah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas negara, termasuk pelaku aksi teror, untuk mengembangkan aksinya. Hal inilah yang perlu

terus diwaspadai dan diantisipasi oleh Indonesia, Filipina, dan juga Malaysia, tidak saja untuk menghadapi kasus Marawi, tetapi juga untuk menghadapi potensi ancaman keamanan lainnya, termasuk terorisme.

Atas dasar kepentingan itulah, terutama dalam rangka menghadapi tantangan keamanan di perairan perbatasan, Indonesia bersama dengan Malaysia dan Filipina secara resmi pada 19 Juni 2017 memulai kegiatan kerja sama patroli maritim terkoordinasi trilateral (*Trilateral Maritime Patrol Indomalphi*). Peluncuran patroli maritim trilateral ini, sebagaimana dikemukakan Menteri Pertahanan RI dalam sambutannya, dapat menjadi garis awal dan momentum bersejarah untuk ketiga negara dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama pertahanan di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan. Khusus dengan Filipina, kegiatan patroli maritim dilaksanakan melalui Patkor Philindo, untuk menjaga keamanan perairan Filipina dan Indonesia.

Untuk memperkuat kerja sama dengan Filipina, pada 10 Agustus 2017 BNPT melakukan nota kesepahaman dengan Filipina untuk membentuk kerangka kerja dalam mengatasi gangguan keamanan, khususnya dalam mencegah, menekan, dan memerangi terorisme internasional dan kejahatan lintas negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran nota kesepahaman Indonesia-Filipina ini juga dilatarbelakangi oleh peristiwa yang terjadi di Kota Marawi. Bulan Oktober 2017, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan pertempuran di Kota Marawi berakhir, menyusul terbunuhnya Isnilon Hapilon, pemimpin Abu Sayyaf yang didukung ISIS di Asia Tenggara dalam sebuah operasi militer oleh pasukan tentara Filipina.

Keberhasilan pasukan Filipina menumpas pemberontakan di Marawi, segera diantisipasi oleh Indonesia dengan memperketat pengawasan di wilayah perbatasan, seperti yang dilakukan oleh aparat di Sulawesi Utara dan Maluku Utara, yang wilayah perairannya tidak jauh dari wilayah Filipina. Aparat memperketat pengawasan dengan menambah pasukan di wilayah-wilayah rawan penyusupan (termasuk meningkatkan patroli maritim), meningkatkan peran Tim PORA, dan menggalang masyarakat di daerah pesisir dengan menghimbau untuk secepatnya melaporkan jika mengetahui adanya warga baru. Langkah antisipasi juga dilakukan dengan memperkuat koordinasi antara-instansi

terkait guna meningkatkan pengawasan terhadap WNI/WNA yang masuk/keluar wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme sudah tentu juga dilakukan Indonesia dalam kerangka ASEAN. Pencapaian utama ASEAN dalam kampanye perang melawan terorisme adalah dideklarasikannya *ASEAN Convention on Counter Terrorism* tahun 2007. Dipicu oleh aktivitas teroris di Marawi, Filipina, pada tahun 2017, enam negara ASEAN (yang meliputi Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Singapura) pada tanggal 25 Januari 2018 di Bali meluncurkan pakta kerja sama intelijen, yang bernama *Our Eyes Initiatives*, untuk melawan terorisme berbasis radikalisme dan ekstrimisme di kawasan. Inisiatif *Our Eyes* diluncurkan untuk memudahkan enam negara ASEAN bertukar informasi strategis, salah satunya tentang keberadaan dan pergerakan kelompok militan.

Kerja sama luar negeri Indonesia dalam penanggulangan terorisme, juga dilakukan dengan negara-negara di luar ASEAN, salah satunya adalah dengan Australia. Kerja sama ini didasari atas kesadaran yang sama dalam melihat aktivitas terorisme sebagai kejahatan lintas batas negara sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional dan kestabilan kedua negara. Kerja sama Indonesia dan Australia semakin intens setelah peristiwa Bom Bali I, 12 Oktober 2002, yang menewaskan 202 orang, 88 orang diantaranya warga negara Australia. Mengakui akan kebutuhan untuk memperkuat kerja sama internasional pada semua tingkatan dalam memerangi terorisme secara komprehensif, pada 21 Desember 2015, Indonesia dan Australia menandatangani MoU tentang Pemberantasan Terorisme Internasional.

Kerja sama Indonesia dan Australia, dan juga dengan negara-negara ASEAN lainnya, dalam penanggulangan terorisme semakin diperkuat pasca-kasus Marawi di Filipina, antara lain dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya teroris asing (*Foreign Terrorist Fighters/FTF*) ke kawasan yang diduga berasal dari jaringan ISIS. Komitmen Indonesia dan Australia untuk menjaga stabilitas kawasan dikemukakan kembali oleh kedua pihak pada pertemuan bilateral 2+2 ketiga di Sydney, Australia, 16 Maret 2018. Dalam pertemuan ini, Indonesia dan Australia sepakat memperkuat pertahanan, termasuk memerangi terorisme. Salah satu hal yang perlu diantisipasi oleh Indonesia dan Australia terkait ancaman terorisme ini adalah bahaya kombatan perang

Irak dan Suriah yang kembali ke negara asal, dan oleh karenanya untuk menangani ini pertukaran data intelijen menjadi hal penting.

Sebagai simpulan, kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme bagi Indonesia menjadi sebuah kebutuhan dan tidak terelakkan, mengingat fenomena terorisme sudah bersifat lintas batas. Kerja sama tersebut dapat dilakukan secara bilateral, trilateral, atau multilateral seperti melalui ASEAN, dengan memerhatikan kebutuhan negara-negara yang melakukan kerja sama itu, agar kerja sama dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bersama. Kerja sama memerangi dan memberantas terorisme di kawasan tidak cukup dengan mengeluarkan seruan atau deklarasi, tetapi juga harus diikuti dengan langkah-langkah konkret melalui program kerja sama yang diimplementasikan, terutama kerja sama di bidang pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- “A Tale of Two Institutions: The ARF, ADMM-Plus and Security Regionalism in the Asia Pacific,” *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 39, Issue 2 (Aug 2017), hal. 259-264.
- Bonciu, Florin, “Japan and the Challenges of a New Global Reality”, *Romanian Economic and Business Review*, Vol. 11, Issue 3 (Fall 2016), hal. 34-43.
- Chau, Andrew, “Security Community and Southeast Asia: Australia, the U.S., and ASEAN’s Counter-Terror Strategy”, *Asian Survey*, Vol. 48, Issue 4 (July/Aug 2008), hal. 626-649.
- Chow, Jonathan T., “ASEAN Counterterrorism Cooperation Since 9/11”, *Asian Survey*, Vol. 45, Issue 2 (Mar/Apr 2005), hal. 302-321.
- Haryani, Silvia, “Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia: Perbandingan Antara Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono”, *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, Vol. 21, No. 4, 2008.
- Monaco, Lisa. “Preventing the Next Attack: A Strategy for the War on Terrorism”, *Foreign Affairs*, New York, Vol. 96, Iss. 6, (Nov/Dec 2017), hal. 23-29.
- Paust, Jordan J. “Terrorism as an International Crime”, dalam Giuseppe Nesi (Ed.), *International Cooperation in Counter-terrorism: The United Nations and Regional Organizations in the Fight Against Terrorism*, Routledge, New York, 2016, hal. 25-30.
- Pipe, Carolne Kennedy, “Terrorism Studies: What We Have Forgotten and What We Now Know”, *Government and Opposition*, Cambridge Vol. 53, Iss. 2, (Apr 2018), hal. 356-384.
- Roberts, Christopher B., Ahmad D. Habir, “Indonesia-Australia Relations: Progress, Challenges and Potential”, dalam C.B. Roberts et al. (eds.), *Indonesia’s Ascent: Power, Leadership, the Regional Order*, Palgrave Macmillan, 2015, hal. 195-223.
- Rose, Gregory and Diana Nestorovska, “Towards An ASEAN Counter-Terrorism Treaty”, *Singapore Year Book of Internasional Law*, Vol. 9 (2005), hal. 157-189.
- Schmid, Alex P. “The Definition of Terrorism”, dalam Alex P. Schmid (Ed.), *The Routledge Hanbook of Terrorism Research*, Routledge, New York, 2011.
- Wuryandari, Ganewati. “Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Isu Terorisme Internasional”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014.

Portal/Media Online

- “Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation”, *dfat.gov.au.*, <https://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/agreement-between-the-republic-of-indonesia-and-australia-on-the-framework-for-security-cooperation.aspx>, diakses 2 Juni 2018.
- “Antisipasi Anggota ISIS dari Marawi, Pintu Masuk Perbatasan Diperketat”, *Kompas.com.*, 19 Oktober 2017, <https://regional.kompas.com/read/2017/10/19/07154561/antisipasi-anggota-isis-dari-marawi-pintu-masuk-perbatasan-diperketat>, diakses 30 Mei 2018.
- “BNPT: Pendanaan Terorisme Terafiliasi ISIS Meningkat”, *Mediaindonesia.com.*, 27 September 2017, <http://www.mediaindonesia.com/news/read/124433/bnpt-pendanaan-terorisme-terafiliasi-isis-meningkat/2017-09-27> - diakses 1 Februari 2018.
- “BNPT: Waspadai ancaman ISIS dari Marawi”, *Antaranews.com.*, 23 Mei 2018, <https://www.antaranews.com/berita/712797/bnpt-waspadai-ancaman-isis-dari-marawi>, diakses 26 Mei 2018.
- Hincks, Joseph. “The Battle for Marawi City: What the siege of a Philippine city reveals about ISIS’ deadly new front in Asia”, *Time.com.*, 9 Juni 2017, <http://time.com/marawi-philippines-isis/>, diakses 26 Februari 2018.
- “Indonesia, Malaysia dan Filipina Resmi Mulai Kerja Sama Patroli Maritim Terkoordinasi”, *Kemhan.go.id.*, 19 Juni 2017, <https://www.kemhan.go.id/2017/06/19/indonesia-malaysia-dan-filipina-resmi-mulai-kerja-sama-patroli-maritim-terkoordinasi.html>, diakses 26 Mei 2018.
- “Kepala BNPT: ISIS Ditetapkan sebagai Organisasi Teroris”, *Beritasatu.com.*, 27 September 2017, <http://www.beritasatu.com/hukum/454976-kepala-bnpt-isis-ditetapkan-sebagai-organisasi-teroris.html> - diakses 31 Januari 2018.

“KRI Sultan Hasanuddin dan KRI Sultan Iskandar Muda Kunjungi Pelabuhan General Santos Filipina Selatan”, *Kemlu.go.id.*, 31 Oktober 2017, <https://www.kemlu.go.id/davaocity/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/KRI-Sultan-Hassanudin-dan-KRI-Iskandar-Muda-Kunjungi-Pelabuhan-General-Santos.aspx>, diakses 28 Mei 2018.

“Resolution 2199 (2015)”, *United Nations, Security Council*, 12 February 2015, <https://www.un.org/press/en/2015/sc11775.doc.htm> - diakses 15 Februari 2018.

Springer, Kyle, “Australia and Indonesia: Strategic Partners in a Time of Change”, *Australian Institute of International Affairs*, 17 April 2018, <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/australia-indonesia-relations-strategic-partners-in-a-time-of-change>, diakses 2 Juni 2018.

“7 Aksi Teror Mematikan Terbesar Sepanjang 2017”, *Kompas.com.*, 23 Desember 2017, <http://internasional.kompas.com/read/2017/12/23/12000001/7-aksi-teror-mematikan-terbesar-sepanjang-2017> - diakses 31 Januari 2018.

Surat Kabar/Laporan/Dokumen

“ASEAN and Australia sign deal to combat terrorism together”, *The Jakarta Post*, 18 Maret 2018, hal. 11.

“ASEAN 6 discuss further cooperation”, *The Jakarta Post*, 5 Februari, 2018, hal. 10.

“Defeating terrorism together”, *The Jakarta Post*, 26 Januari 2018, hal. 11.

“Densus 88 to coordinate with Philippines on arrested Indonesian terrorists”, *The Jakarta Post*, 6 November 2017, hal. 10.

“Duterte declares mission accomplished in Marawi”, *The Jakarta Post*, 17 Oktober 2017, hal. 11.

“Indonesia, Australia sign action plan on m on maritime cooperation”, *The Jakarta Post*, 17 Maret 2018, hal. 11.

“Kemenlu Siapkan 8 Langkah Strategis”, *Media Indonesia*, 10 Januari 2018, hal. 14.

“Letter from the Secretary General to the President of the General Assembly”, dalam *The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy*, United Nations: General Assembly, 24 Desember 2015.

“Philippines: The Philippines, Indonesia, and Malaysia Forge Collective Effort Against Terrorism, Extremism”, *MENA Report*, London, 22 Juni 2017.

“Philippines: ‘Battle of Marawi’ Leaves Trail of Death, Destruction”, Washinton, D.C.: *Targeted News Service*, 18 November 2017.

“UN chief warns terrorism ‘unprecedented threat’ to world peace”, *UN News Centre*, 17 November 2017.

Narasumber Wawancara

- Abdullah Sadik S.Ip., Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate
- Bappeda Maluku Utara
- Brigjen TNI Gatot Eko Puruhito, Kabinda Provinsi Maluku Utara
- David Braun, *Political and Public Affairs Branch*, Kedubes Australia
- Fanfan Infansyah, Direktorat Kerjasama Bilateral BNPT
- Irjen Pol. Bambang Waskito, Kapolda Sulawesi Utara
- Danny Mandak ME., Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sangihe
- Kodim 1301/Sangihe
- Kolonel Laut (P) Anung Sutanto, Asops Lantamal VIII
- Kolonel Laut (P) Rizaldi, Danlanal Ternate
- Kolonel Laut (P) Setiyo Widodo, Komandan Lanal Tahuna
- Kombes Kristono, Kepala Biro Operasi Polda Sulawesi Utara
- Kompol Toni Kasmiri, Wakapolres Pulau Morotai
- Korem 131/Santiago, Manado
- Kris Erlangga, Direktur Kerja Sama Bilateral BNPT
- Laksma TNI Ahmadi Heri Purwono, Komandan Lantamal VIII
- Mayor Inf. Laode Mohamad Sabaruddin, Kasi Ter Korem 152/Babullah
- Mochamad Chanda Widya Yudha, Kemenlu RI
- Nasir Abas, Konsultan Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Terorisme, UI
- TNI AU Lanud Leo Watimena, Morotai